



## **Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Sabu Raijua**

**Leny Kana**

Universitas Nusa Cendana

**Marselina Radja Tuka**

Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Korespondensi penulis: [lenykana89@gmail.com](mailto:lenykana89@gmail.com)

**Abstrak.** *This study analyzes regional economic development as a crucial instrument for improving community welfare within the framework of regional autonomy. This study aims to analyze the role of local government in economic development in Sabu Raijua Regency, including policies implemented, their implementation, and their impact on the economy and community welfare. This study uses a qualitative approach with a literature review method, utilizing secondary data sourced from the Sabu Raijua Regency Central Statistics Agency (BPS), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) document, and relevant scientific journals. The results reveal: 1) the local government has played an active role in economic development by strengthening leading sectors based on local potential, particularly agriculture, livestock, and fisheries; 2) regional economic development policies have been systematically formulated, but their implementation has not been optimal due to limited infrastructure, the geographical conditions of the archipelago, and the quality of human resources; and 3) the role of local government has had a positive impact on increasing economic activity and community welfare, although it still requires strengthening policy implementation and institutional capacity. Therefore, regional economic development in Sabu Raijua Regency needs to be supported by more effective, implementable, and sustainable policies.*

**Keywords:** *Community Welfare; Regional Economic Development; Role Of Local Government*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis Pembangunan ekonomi daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua, meliputi kebijakan yang dijalankan, implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengungkap: 1) pemerintah daerah telah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan; 2) kebijakan pembangunan ekonomi daerah telah dirumuskan secara sistematis, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis kepulauan, dan kualitas sumber daya manusia; serta 3) peran pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan implementasi kebijakan dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sabu Raijua perlu didukung oleh kebijakan yang lebih efektif, implementatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Kesejahteraan Masyarakat; Pembangunan Ekonomi Daerah; Peran Pemerintah Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal, merancang kebijakan pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi wilayah dan merespons berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi yang mendukung iklim usaha, menyediakan infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi produktif. Peran ini menjadi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah (Arsyad, 2016).

Kabupaten Sabu Raijua sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik ekonomi yang masih bertumpu pada sektor-sektor primer, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sabu Raijua sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sektor unggulan dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas serta nilai tambah ekonomi lokal (BPS Kabupaten Sabu Raijua, 2023). Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur ekonomi, serta pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara merata (Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, 2021).

Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan, pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sabu Raijua masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis kepulauan yang mempersulit akses dan distribusi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih optimal agar kebijakan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran (BPS Kabupaten Sabu Raijua, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut kajian mengenai “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Sabu Raijua” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi, kebijakan dan program yang dijalankan, implementasi kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah diberi kewenangan luas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan sesuai karakteristik wilayah. Menurut Akhmad dan Rahma (2022), pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan berbasis potensi lokal menjadi penting karena setiap daerah memiliki struktur ekonomi dan sumber daya yang berbeda (Utami & Mahfudz, 2023). Oleh karena itu, strategi pembangunan yang efektif harus memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.

### **Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi**

Pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pembangunan ekonomi. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi ekonomi lokal; sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan infrastruktur dan layanan publik; dan sebagai katalisator, pemerintah mendorong sinergi antar pelaku ekonomi. Lestari dan Kurniawan (2021) menegaskan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang transparan dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, Nugraha et al. (2024) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan kualitas birokrasi menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena pembangunan ekonomi daerah, khususnya peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan penggerak pembangunan ekonomi masyarakat (Creswell, 2014). Metode studi kepustakaan digunakan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah serta karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk menelaah konsep, kebijakan, dan temuan penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap suatu permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan menjelaskan secara sistematis peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua melalui penelusuran berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sabu Raijua merupakan bentuk nyata pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021–2026, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, serta pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai penunjang aktivitas produksi dan distribusi (Pemerintah Kabupaten Sabu

Raijua, 2021). Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua (2023) mencatat bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal turut memengaruhi capaian pembangunan ekonomi daerah. Pada artikel lain dengan penelitian Sulastri et al. (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah memerlukan dukungan implementasi yang kuat, terutama dalam bentuk peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan kelembagaan, agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua**

Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Di Kabupaten Sabu Raijua, peran tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan ekonomi, penyediaan pelayanan publik, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal (Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, 2021). Pemerintah juga berperan dalam mengoordinasikan perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Todaro dan Smith (2015), keterlibatan aktif pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mengelola sumber daya dan mengatasi hambatan struktural pembangunan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tedyansyah et al. (2025) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan melalui pengembangan sektor unggulan dan penyediaan infrastruktur ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Sabu Raijua, peran pemerintah menjadi krusial mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan intervensi kebijakan dan koordinasi pembangunan yang lebih intensif.

## **3. Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi**

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur ekonomi. BPS Kabupaten Sabu Raijua (2023) menunjukkan bahwa sektor pertanian dan peternakan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka menengah. Hal ini sejalan dengan pandangan Arsyad (2016) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang efektif harus mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dampak Peran Pemerintah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan BPS Kabupaten Sabu Raijua (2023), pelaksanaan berbagai program pembangunan ekonomi telah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan UMKM. Dukungan pemerintah melalui kebijakan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur turut memperlancar akses masyarakat terhadap pasar dan sumber ekonomi.

Selain dampak ekonomi, pembangunan ekonomi daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, peran pemerintah daerah di Kabupaten Sabu Raijua memiliki kontribusi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta pemberdayaan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Komitmen ini tercermin dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021–2026 yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas pembangunan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan berupa dominasi sektor primer dengan produktivitas rendah, keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis kepulauan, serta kualitas sumber daya manusia dan kapasitas fiskal yang terbatas. Kendati demikian, peran aktif pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan di Kabupaten Sabu Raijua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, M., & Rahma, N. (2022). Regional Economic Development and Local Competitiveness in Indonesia. *Journal of Regional Economics and Policy*, 14(3), 215–230.
- Arsyad. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua. (2023). *Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Sabu Raijua.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua. (2024). *Laporan Tahunan BPS Kabupaten Sabu Raijua*.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Lestari, R., & Kurniawan, F. (2021). Local Government Role in Inclusive Economic Development in Indonesia. *Public Administration Review*, 9(2), 88–104.
- Lian, Y. F., Utama, G. A. S. P., & Irianto, P. F. D. (n.d.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua (p. 51).
- Nugraha, D., Ramadhani, R., & Hidayat, M. (2024). Governance Quality and Local Economic Development. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 45–63.
- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021–2026*. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- Sari, M. S., & Zefri. (2019). Analisis penggunaan data sekunder dalam penelitian ekonomi dan sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 120–129.
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran pemerintah Indonesia dalam pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 4(1), 45–58.
- Susanti, R., Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2023). Studi kepustakaan sebagai metode penelitian dalam kajian ilmu sosial. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial*, 8(1), 45–54.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Development Economic*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Utami, D. S., & Mahfudz, A. (2023). Local-Based Economic Growth and Inclusive Development in Eastern Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 17(2), 102–117.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.